

# DAMPAK PAYTREN Terhadap Kesejahteraan Mitra

TABEL 1 JENIS MITRA DAN JUMLAH RESPONDEN YANG DIAMATI

No	Wilayah	Jumlah Responden (orang)
1	Jakarta	115
2	Bogor	123
3	Depok	72
4	Tangerang	120
5	Bekasi	120
6	Bandung	120
7	Semarang	120
8	Surabaya	68
9	Medan	120
10	Makassar	120
<b>Total Responden</b>		<b>1.098</b>

Dalam dunia keuangan, teknologi menjadi salah satu alat yang mampu mempercepat dan memudahkan perkembangan sektor keuangan secara masif atau yang selama ini dikenal dengan *financial technology*. *Financial technology* atau lebih dikenal dengan *FinTech* merupakan suatu inovasi disruptif, yaitu inovasi yang mampu mentransformasi suatu sistem pasar dengan menghadirkan kemudahan, kepraktisan, dan keamanan dengan biaya yang relatif lebih ekonomis. Inovasi disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, tetapi inovasinya bersifat *breakthrough* dan mampu mendefinisikan ulang suatu sistem atau pasar yang telah ada (Hadad, 2017). Munculnya inovasi disruptif ini dapat membuat pasar atau sistem yang telah ada menjadi berubah atau bahkan hancur. Sebagai contoh jatuhnya Nokia yang awalnya menguasai pasar dengan teknologi telepon genggam yang ditawarkan karena adanya inovasi baru yang lebih memudahkan dan ekonomis.

Fenomena *FinTech* ini pun melanda Indonesia. Data menunjukkan bahwa proporsi terbesar pada fitur *FinTech* di Indonesia adalah pembayaran (42,22 persen). Fitur selanjutnya adalah pinjaman (17,78 persen), *aggregator* (12,59 persen), *personal and financial planning* dan *crowdfunding* masing-masing sebesar 8,15 persen, serta sisanya merupakan fitur lainnya (OJK, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi pembayaran pada *FinTech* merupakan fitur yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Beranjak dari pengalihan potensi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran berbasis teknologi, muncul ide Ustadz Yusuf Mansur yang ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan kebiasaan menggunakan gadget dan kebiasaan membayar kewajiban. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Veritra Sentosa Internasional didirikan dengan produk yang dikeluarkan adalah Paytren.

Kehadiran Paytren diharapkan dapat membawa dampak positif bagi mitranya. Penggunaan istilah mitra ini mengindikasikan semangat Paytren untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan mitranya. Konteks kesejahteraan bukan hanya pada sisi materi tetapi juga pada sisi spiritual. Hal ini disebabkan dalam menjalankan bisnis Paytren harus selalu dilandasi

dengan semangat spiritual yang tinggi. Dalam konteks ini, maka keberadaan model CIBEST yang mencoba mengkombinasikan antara analisis kesejahteraan material dan spiritual berdasarkan perspektif syariah menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak Paytren terhadap mitranya dengan menggunakan Model CIBEST sangat penting dilakukan. Adapun total responden pada penelitian ini adalah 1.098 responden (lihat Tabel 1).

**Hasil Agregat Keseluruhan Wilayah**  
Hasil agregat keseluruhan dibuat untuk melihat secara utuh gambaran dari

dampak bisnis Paytren terhadap mitranya. Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh hasil per daerah dan dikelompokkan sesuai dengan kuadran masing-masing. Pengukuran garis kemiskinan (GK) yang dipakai merupakan GK per daerah agar tidak terjadi bias pada hasil.

Tabel 2 menjelaskan bahwa dari total 1.098 responden, nilai rata-rata skor spiritual responden pada level yang baik dan mengalami peningkatan dari 4,15 menjadi 4,45. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi spiritual, responden mitra Paytren sudah memiliki skor spiritual yang tinggi sebelum mereka mengikuti bisnis Paytren. Adanya pembinaan dan program-program yang berkaitan dengan peningkatan spiritual membuat skor spiritual mitra menjadi semakin meningkat.

Selain itu dari sisi pendapatan, rata-rata pendapatan mitra meningkat sebesar 24,31 persen. Pendapatan rata-rata keseluruhan responden sebelum menjadi mitra mencapai Rp 4.937.391 dan setelah menjadi mitra mencapai Rp 6.137.557. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas mitra Paytren sebelum mengikuti program Paytren memiliki pendapatan di atas GK. Akan tetapi, adanya program bisnis Paytren terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mitra dari sisi material.

Setelah memperoleh skor spiritual dan material, maka dilakukan perhitungan terhadap empat nilai yang meliputi sejahtera (W), kemiskinan material (Pm), kemiskinan spiritual (Ps), dan kemiskinan absolut (Pa). Pada Gambar 1, terlihat

adanya perubahan antar kuadran. Pada indeks sejahtera (W) terjadi kenaikan sebesar 6,74 persen dari 0,8188 sebelum bergabung menjadi mitra dan 0,8862 setelah bergabung menjadi mitra. Perubahan ini mengindikasikan adanya dampak positif terhadap pendapatan dan spiritual yang diterima mitra dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Paytren pusat maupun daerah.

Pada indeks kemiskinan (Pm) terlihat pula perubahan yang positif. Indeks kemiskinan material mengalami penurunan sebesar 4,55 persen dari 0,1566 menjadi 0,1111. Nilai ini mengindikasikan bahwa mitra yang bergabung dengan Paytren mendapatkan dampak yang positif untuk menjadi lebih sejahtera dari sisi material. Selain itu, pada indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan dari 0,0219 menjadi 0,0027, atau terjadi penurunan sebesar 1,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa program kerohanian dan pengajaran memberikan dampak yang nyata bagi para mitra dalam peningkatan spiritualitas.

Selain itu, terjadi penurunan pada indeks kemiskinan absolut sebesar 0,27 persen. Hal tersebut menggambarkan keberhasilan Paytren dalam mengentaskan kemiskinan spiritual dan material yang pada awalnya terdapat indeks kemiskinan absolut sebesar 0,0027 dan berubah menjadi 0 sesudah mitra bergabung dengan Paytren.

Berdasarkan wilayah, peningkatan pada indeks kesejahteraan terbesar (14,20 persen) terjadi di wilayah Medan dan terkecil (1,47 persen) di wilayah Surabaya. Sementara itu, penurunan indeks kemiskinan material terbesar (8,33 persen) terjadi di wilayah Makassar dan terkecil (1,47 persen) di wilayah Surabaya. Untuk kemiskinan spiritual penurunan terbesar terjadi di wilayah Medan (10,00 persen) dan terkecil terkecil di Makassar (0,80 persen). Demikian pula untuk kemiskinan absolut, penurunan terbesar di Makassar (1,70 persen) dan yang terkecil di Medan (0,80 persen). Wallaahu a'lam. ■

TABEL 2 RATA-RATA SKOR SPIRITUAL DAN PENDAPATAN MITRA PAYTREN

Sebelum Menjadi Mitra	Setelah Menjadi Mitra
<b>Skor Rata-Rata Kebutuhan Spiritual</b>	
<b>4.15</b>	<b>4.45</b>
<b>Rata-Rata Pendapatan</b>	
<b>Rp. 4.937.391</b>	<b>Rp. 6.137.557</b>

Sumber: Data primer 2017 (diolah)

GAMBAR 1 GRAFIK PENGELOMPOKAN RESPONDEN TOTAL BERDASARKAN KUADRAN CIBEST

	Kemiskinan Material (Pm)	Sejahtera (W)
<b>GARIS KEMISKINAN SPIRITUAL</b>	Sebelum: 0,1566 → Sesudah: 0,1111 Perubahan: -4,55persen	Sebelum: 0,8188 → Sesudah: 0,8862 Perubahan: +6,74persen
	Kemiskinan Absolut (Pa) Sebelum: 0,0027 → Sesudah: 0,0000 Perubahan: -0,27 persen	Kemiskinan Spiritual (Ps) Sebelum: 0,0219 → Sesudah: 0,0027 Perubahan: -1,91persen

**GARIS KEMISKINAN MATERIAL**

## TSAQOFI

### Inovasi Ekonomi Sosial Syariah



**Dr Irfan Syaucki Beik**  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu pilar penting dalam perekonomian syariah adalah sektor ekonomi sosial syariah. Sektor ini direpresentasikan oleh instrumen zakat (termasuk infak dan sedekah) dan wakaf. Pentingnya sektor ini pun secara eksplisit telah ditegaskan Allah SWT di dalam Al-Quran, dimana sektor ini adalah salah satu antitesa dari sistem ekonomi ribawi (lihat QS 30:39 dan QS 2:276). Secara potensi, sektor ini masih belum teroptimalkan dengan baik, meski upaya perbaikan dan peningkatan kualitas telah dilakukan terus menerus. Tren pertumbuhannya terus positif, namun kesenjangan antara potensi dengan realisasinya di lapangan masih cukup tinggi.

Sebagai contoh, rata-rata pertumbuhan penghimpunan zakat nasional dalam kurun waktu 2002-2016 mencapai angka 35,84 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 5,41 persen dalam periode yang sama. Namun jika dibandingkan dengan potensinya, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Demikian pula dengan potensi wakaf yang sangat besar, baik wakaf aset tetap seperti tanah, maupun wakaf uang. Namun sekali lagi, fakta menunjukkan bahwa antara potensi dan realisasi wakaf ini masih terdapat jarak yang cukup jauh.

Untuk memperkuat peran sektor ekonomi sosial syariah ini, maka diperlukan adanya inovasi berkelanjutan. Seorang ekonom kenamaan asal Italia, Valentino Piana menyatakan bahwa inovasi adalah aktivitas orang dan organisasi untuk mengubah diri mereka dan lingkungannya, melalui perubahan cara berpikir, perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif, dan memperkenalkan standar baru, yang boleh jadi berbeda dengan standar sebelumnya. Saking pentingnya inovasi, maka saat ini dalam teori ekonomi telah berkembang satu pendekatan yang disebut dengan *innovation economics*, atau ilmu ekonomi inovasi.

Ekonomi inovasi adalah teori ekonomi yang memfokuskan pada dua hal utama, yaitu *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan inovasi itu sendiri,

yang bersumber dari revolusi pengetahuan yang terus dikembangkan. Para pendukung *economics of innovation* ini menegaskan bahwa tujuan pengembangan inovasi itu ada dua, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi dan memberikan benefit (manfaat) positif untuk masyarakat. Artinya, jika inovasi itu justru malah menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, maka berarti ada sesuatu yang keliru dalam penataan kebijakan ekonominya.

Dalam konteks pengembangan inovasi pada sektor ekonomi sosial syariah ini, penulis berpendapat bahwa *innovation economics* ini dapat diterjemahkan pada tiga hal utama. Pertama, penguatan konsep *techno-sociopreneur* dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Kedua, inovasi program dan kelembagaan, dan yang ketiga adalah inovasi kebijakan. Para stakeholder zakat dan wakaf ini diharapkan dapat terlibat aktif dalam melahirkan ketiga macam inovasi tersebut. Mari kita bahas ketiganya secara singkat.

Pertama, konsep *techno-sociopreneur* pada dasarnya adalah kombinasi antara konsep *technopreneur* dan *sociopreneur*, yaitu bagaimana melahirkan beragam inovasi dalam pengembangan bisnis, dan pada saat yang sama mampu memberikan dampak positif terhadap kelompok masyarakat, terutama kaum dhua, sehingga kualitas kehidupan mereka akan semakin meningkat. Dalam konteks zakat dan wakaf, aplikasi konsep ini harus dapat direalisasikan pada dua kelompok utama, yaitu pengelola zakat dan wakaf (amil dan nazir), dan para penerima manfaat zakat dan wakaf. Artinya, baik amil dan nazir, maupun mustahik zakat dan kaum miskin yang menjadi *mauquf alaih* program wakaf, harus memiliki jiwa *techno-sociopreneurship* yang kuat. Ini bisa dibangun melalui desain kebijakan pengembangan kualitas SDM amil dan nazir, dan juga pada desain program yang mampu mengakomodasi tumbuhnya *techno-sociopreneur* kaum miskin yang menjadi sasaran program zakat dan

wakaf, sehingga mereka bisa mengalami mobilitas vertikal.

Kedua, inovasi program dan kelembagaan. Ini hal yang sangat penting karena sangat terkait dengan kinerja kelembagaan zakat dan wakaf. Inovasi program ini mencakup antara lain : inovasi produk, seperti program penyaluran yang kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi; inovasi proses, seperti metode penyaluran zakat yang memberi dampak terbesar terhadap peningkatan pendapatan mustahik; dan inovasi komunikasi publik, yang terkait dengan promosi dan kampanye penyadaran zakat dan wakaf. Sementara inovasi kelembagaan terkait dengan restrukturisasi institusi yang mampu menjamin kualitas program bisa ter-delivered dengan baik.

Sebagai contoh, BAZNAS telah meresmikan lembaga program yang disebut LAB (Layanan Aktif BAZNAS). Di satu sisi, filosofi LAB sebagai Umar bin Khattab-nya lembaga zakat sebagaimana dinyatakan Deputi BAZNAS M Arifin Purwakananta, yang bertugas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mustahik-mustahik yang ada di setiap pelosok dan memberi bantuan langsung yang bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, merupakan salah satu inovasi program yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, agar efektif, inovasi program ini harus diimbangi dengan inovasi struktur kelembagaan yang efektif dan mampu merespon setiap persoalan dengan cepat dan tepat.

Ketiga, inovasi kebijakan. Harus ada terobosan dari sisi kebijakan zakat dan wakaf di Indonesia. Contoh terobosan yang telah dilakukan antara lain penggunaan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak zakat. Namun hal ini tidaklah cukup, harus ada upaya yang lebih besar lagi terutama dari pemerintah untuk melahirkan beragam kebijakan yang akan memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf, seperti rencana Perpres Zakat untuk ASN dan kebijakan pengembangan waqf *linked sukuk*. Wallaahu a'lam. ■

# Dampak Program Laznas IZI Terhadap Kesejahteraan Mustahik

TABEL 1 RATA-RATA SKOR SPIRITUAL MUSTAHIK

Skor Rata-Rata Kebutuhan Spiritual Mustahik	
Sebelum Program Zakat	Setelah Program Zakat
4.01	4.12

Sumber: Data primer 2017 (diolah)

**K**emiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan optimal. Menurut Ishaq (2002), salah satu penyebab kegagalan lembaga-lembaga pembangunan internasional dan pemerintah negara-negara berkembang dalam mengurangi angka kemiskinan adalah karena diabaikannya instrumen-instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat setempat. Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama ini didasarkan pada kerangka ekonomi konvensional yang sering mengabaikan instrumen ekonomi berbasis keagamaan (Beik, 2013). Oleh karena itu, agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan lebih baik, maka diperlukan adanya pendekatan baru yang berorientasi pada instrumen keagamaan. Salah satunya instrumen ekonomi berbasis keagamaan adalah zakat.

Pada prakteknya, saat ini Indonesia telah memiliki aturan dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan instrumen zakat. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional dan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk masyarakat dan mendapat pengakuan resmi negara. Secara umum, LAZ terbagi atas LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu LAZ di tingkat nasional adalah Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI. Kehadiran IZI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi mustahik (penerima manfaat) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dari sisi materi maupun juga sisi spriritual. Hal ini disebabkan dalam menjalankan programnya, IZI harus selalu dilandasi dengan semangat spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan model CIBEST dalam penelitian ini yang mencoba mengkombinasikan antara analisis kesejahteraan material dan spiritual berdasarkan perspektif syariah menjadi sangat relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan memotret dampak penyaluran zakat bagi mustahik (beneficiaries/para penerima zakat) melalui IZI berdasarkan perspektif syariah. Objek penelitian meliputi penerima zakat di wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Penelitian ini menggunakan model CIBEST. Model CIBEST yang disusun oleh Beik dan Arsyianti (2015) adalah model yang mengkombinasikan kuadran pemenuhan kebutuhan manusia baik dari sisi spiritual maupun material.

Dari sisi spiritual, penghitungan skor spiritual dilakukan berdasarkan 5 indikator yaitu shalat, puasa, zakat dan infak, lingkungan rumah tangga, serta kebijakan pemerintah. Dari data survei di wilayah Jabodetabek dan Cianjur diperoleh hasil penghitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Skor rata-rata kebutuhan spiritual mustahik sebelum pro-

gram 4.01 dan setelah program mencapai 4.12. Kondisi awal spiritual mustahik sebenarnya sudah relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa IZI memilih mustahik yang secara rata-rata memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, sehingga skor spiritualnya berada pada level yang baik. Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata kebutuhan spiritual mustahik pada Tabel 1, skor rata-rata tersebut menunjukkan bahwa program bantuan produktif maupun konsumtif yang diberikan oleh IZI berkorelasi positif terhadap peningkatan kondisi spiritual para mustahik.

Dilihat dari sisi material, nilai rata-rata pendapatan per bulan para mustahik memiliki kecenderungan peningkatan yang cukup baik, yaitu sebesar 26.41 persen, meningkat dari Rp 3,134,518/bulan menjadi Rp 3,962,267/bulan. Hal ini menunjukkan kemampuan program

penyaluran zakat IZI mampu menaikkan pendapatan mustahik dengan nilai yang cukup signifikan. Peningkatan pendapatan tertinggi pada program bantuan produktif, yaitu sebesar 57.67 persen. Rata-rata pendapatan mustahik di wilayah survei sebagaimana tergambar pada Tabel 2.

Jika dibandingkan dengan data BPS, maka mayoritas pendapatan mustahik IZI di wilayah Jabodetabek berada di atas rata-rata pendapatan keluarga berdasarkan GK (Garis Kemiskinan) yang telah ditentukan BPS. Selain kenaikan pendapatan mustahik yang menerima zakat produktif (57.67 persen), mustahik penerima zakat konsumtif juga mengalami peningkatan pendapatan sebesar 8.37 persen. Peningkatan pendapatan mustahik dari penerima zakat konsumtif tidak sebesar zakat produktif karena mustahik tersebut menggunakan dana zakat untuk keperluan non komersial sehingga tidak terfokus untuk meningkatkan pendapatannya.

Setelah memperoleh skor spiritual dan material, maka dilakukan perhitungan terhadap empat nilai yang meliputi sejahtera (W), kemiskinan material (Pm), kemiskinan spiritual (Ps), dan kemiskinan absolut (Pa). Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa indeks sejahtera (W) dari mustahik IZI di Jabodetabek dan Cianjur

meningkat 2 persen yaitu dari 0.75 menjadi 0.77. Indeks kemiskinan material (Pm) mengalami penurunan, yaitu sebesar 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan zakat memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain, indeks kemiskinan spiritual tidak mengalami perubahan.

Secara umum, dilihat dari bentuk bantuan dari wilayah yang disurvei menunjukkan bahwa potret dampak penyaluran bantuan produktif dan konsumtif yang dikelola oleh IZI berdampak positif. Hal ini ditunjukkan melalui kuadran Kesejahteraan/ kuadran W dimana di wilayah survei mengalami peningkatan di kuadran W yaitu 1 persen untuk zakat konsumtif dan 6 persen untuk zakat produktif. Persentase penurunan Pm juga berkorelasi positif dengan adanya program zakat. Dengan adanya dana zakat, terbukti dapat menurunkan kemiskinan material sebesar 1 persen untuk zakat konsumtif hingga 6 persen untuk zakat produktif. Pada program zakat konsumtif, terdapat dua mustahik yang indeks spiritualnya tidak berubah. Hal ini mengindikasikan pendampingan spiritual IZI masih harus ditingkatkan agar dapat mendorong mustahik ke tingkat spiritual yang lebih baik. *Wallaahu a'lam.* ■

TABEL 2. RATA-RATA PENDAPATAN MUSTAHIK

	Pendapatan		Perubahan
	Sebelum	Sesudah	
Produktif	3,422,703	5,396,609	+57.67%
Konsumtif	2,989,291	3,239,449	+8.37%
Rata-rata	3,134,518	3,962,267	+26.41%

Sumber: Data primer 2017 (diolah)

GAMBAR 1 GRAFIK PENGELOMPOKAN RESPONDEN BERDASARKAN CIBEST

<p><b>Kemiskinan Material (Pm)</b> Sebelum: 0.24 → Sesudah : 0.21 Perubahan: -2 persen</p>	<p><b>Sejahtera (W)</b> Sebelum: 0.75 → Sesudah : 0.77 Perubahan: +2 persen</p>
<p><b>Kemiskinan Absolut (Pa)</b> Sebelum: - → Sesudah: - Perubahan: -</p>	<p><b>Kemiskinan Spiritual (Ps)</b> Sebelum: 0.01 → Sesudah : 0.01 Perubahan: 0 persen</p>

**Garis Kemiskinan Material**



**Dr Laily Dwi Arsyianti**

Staf Pengajar  
Departemen Ilmu  
Ekonomi Syariah  
FEM IPB



**Thuba Jazil**

Peneliti Senior pada  
Pusat Studi Bisnis dan  
Ekonomi Syariah  
(CIBEST) IPB dan  
Dosen STEI Tazkia

## TAMKINIA

### Sejarah dan Masa Depan Sistem Ekonomi Islam



**Dr Asep Nurhalim**

Ketua Departemen  
Ilmu Ekonomi Syariah  
FEM IPB

**P**engalaman masa lalu suatu negara dalam mengelola negaranya membentuk sistem ekonomi yang terus diperbarui dari hari ke hari. Hal ini mengantarkan sejarah menjadi laboratorium umat manusia, termasuk laboratorium kajian-kajian ekonomi. Sebagai salah satu ilmu di bidang sosial, ekonomi perlu banyak kembali belajar kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimen baru untuk membentuk konsep yang ideal pada perubahan sistem ekonomi. Terdapat dua kategori sejarah untuk dijadikan hikmah dalam pemikiran ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi secara makro dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu dan badan usaha.

Pentingnya melakukan kajian terhadap sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti itu, di satu sisi akan membantu para pelaku kebijakan dan praktisi dalam menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi islam kontemporer, yaitu sistem ekonomi hasil kajian dari sejarah yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kekinian. Di sisi lain akan memperkaya wawasan dan membuka jangkauan yang lebih luas bagi konsep dan aplikasinya. Sehingga ibarat pensil, sejarah adalah rautan, pensil tersebut adalah sistem ekonomi yang memuat nilai-nilai keislaman. Semakin banyak

kajian dari sejarah, semakin tajam pensil tersebut untuk dapat digunakan.

Misalnya saja di zaman Rasulullah SAW saat beliau pertama kali memimpin Madinah, beliau meletakkan unsur-unsur ekonomi dalam kepemimpinannya dengan mengeluarkan Kebijakan Fiskal. Kebijakan tersebut memuat dua unsur, yang pertama adalah unsur sistem ekonomi dan yang kedua adalah unsur keuangan dan pajak. Saat itu Madinah merupakan negara yang baru terbentuk sehingga kapasitas dari segi ekonomi sangat rendah, oleh karena itu menerapkan kebijakan sistem ekonomi merupakan langkah yang brilian pada saat itu. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berlandaskan nilai dan prinsip Qur'ani. Prinsip yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah, sedangkan manusia diciptakan dengan bentuk yang paling baik dari ciptaan lainnya adalah untuk mengatur semua sumberdaya agar memberikan manfaat seluas-luasnya, namun demikian semuanya akan tetap kembali lagi kepada Allah.

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan antara kebutuhan ruhiyah dan jasmaniyah, dengan kata lain Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi kepada dunia ataupun akhirat saja. Bahkan kita dituntut agar dapat seimbang antara

dunia dan akhirat. Artinya kita harus memikirkan kehidupan akhirat namun tidak melupakan kebutuhan materi duniawi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77. Sehingga pada saat itu masyarakat Madinah juga diberikan kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara yang adil, dengan demikian pada dasarnya Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membatasi kepemilikan pribadi, barang dagangan atau perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara yang tidak bermoral. Namun demikian, Islam pada saat itu sangat melarang aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk melakukan penimbunan kekayaan karena dapat merusak mekanisme pasar. Saat itu Umar ra. yang langsung bertindak sebagai eksekutor untuk menegur para pedagang penimbun barang dagangan.

Selain itu dalam unsur kebijakan sistem ekonomi, Rasulullah SAW juga dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi. Hal ini secara nyata terus diulang-ulang oleh Allah dalam Al Qur'an seperti pada surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa' ayat 161, Ali Imran ayat 130, Al Baqarah ayat 275 dan masih banyak lagi. Betapa tegas pada saat itu Rasulullah SAW menerapkan sistem ekonomi bebas ribawi ini. Unsur

dari Kebijakan Fiskal yang kedua adalah keuangan dan pajak, pada awal-awal tahun sejak dideklarasikan Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara, seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah sendiri pada saat itu selain berperan sebagai Kepala Negara, juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, Panglima Perang Tertinggi sekaligus penanggung jawab administrasi negara tanpa memperoleh gaji dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa makanan. Baru pada periode selanjutnya, Rasulullah mulai melakukan penegasan terhadap pemerintahan ekonomi dengan zakat sebagai instrumennya.

Keberhasilan seorang pemimpin dapat dibuktikan dengan kemampuannya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya sebagaimana Rasulullah SAW dan para penerusnya. Bangsa dan negara ini pun sedang membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah, secara khusus sejarah ekonomi Islam untuk melakukan studi dan kajian-kajian mendalam dalam rangka mempertajam sistem ekonomi negara, sehingga kejayaan Islam yang dicita-citakan segera menjadi kenyataan. ■